

BAB II

LANDASAN TEORI

A. IMPLEMENTASI

1. Pengertian Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan sedangkan menurut Fullan, implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Sementara itu, pada tingkat pemerintahan, implementasi kebijakan bukan hanya sekadar mengubah visi dan misi menjadi tindakan konkret, tetapi juga menghadirkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh rakyat negara tersebut.²⁰

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan

²⁰ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), h. 6

atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut.²¹

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.²²

Pada dasarnya , implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu

²¹ 1Oktasari IInda Duana."Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMANegeri1Perembun." Yogyakarta. Universitas negeri Yogyakarta 2015.

²² Mulyadi, "Implementasi Organisasi, Yogyakarta," Gadjah Mada Univercity2015

untuk mencapai tujuan kegiatan.²³ Pada pemerintahan, implementasi negara menerjemahkan visi menjadi aksi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selanjutnya, Implementasi dalam kebijakan publik (*public policy implementation*) merupakan suatu pelaksanaan keputusan (*decision*) yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik. Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pemenuhan dalam konteks ini, keselarasan antara visi kebijakan dan eksekusi lapangan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh pihak terkait.²⁴

Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan

²³ Zakky, *Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum*, (Agustus 27, 2020)

²⁴ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 189-191

penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dengan demikian Pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional. Khususnya untuk membantu pembiayaannya, Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang berbeda-beda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya.²⁵

Sementara itu Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dalam bukunya Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara yaitu: "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan."²⁶

Dengan demikian Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan

²⁵ Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2015), h. 12v

²⁶ Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.65

baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik. Implementasi kebijakan (Policy Implementation)* adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu.²⁷

Selain itu berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistik. Faktor-faktor tersebut diantaranya:²⁸

1. Kondisi Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

2. Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah

²⁷ Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h.132

²⁸ Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.101

program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumber daya organisasi untuk implementasi program.

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Dengan demikian Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai, makna pelaksanaan undang-undang dimasa berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

2. Model-Model Implementasi kebijakan

Model Implementasi Kebijakan mempunyai enam

variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja. Model ini seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empirik.²⁹

Sementara itu, Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai, makna pelaksanaan undang-undang dimasa berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program, adapun model-model Implementasi antara lain:

1. Model Menurut George Edward III.

Model ini menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor: ³⁰

- a. Komunikasi

²⁹ Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implemntasi Kebijakan Negara*. Edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.67

³⁰ Edward III 4 *komponen teori implementasi peraturan* (2010), h. 96-110

Komunikasi Menurut Edward III, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi antara lain:

- 1) Dimensi transmisi, menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*), menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masingmasing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif.

- 3) Dimensi konsistensi, (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumber Daya

Edward III, mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan antara lain:

- 1) Sumber daya manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan *"probably the most essential resources in implementing policy is staff"*. Edward III menambahkan *"no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately."*
- 2) Sumber daya Anggaran Edward III menyatakan bahwa, kesimpulan studinya *"budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public"*, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan

kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

- 3) Sumber daya Peralatan Edward III menyatakan bahwa, sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
- 4) Sumber daya Kewenangan Edward III menyatakan bahwa, Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III, menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi

Disposisi menurut Edward III, dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan Birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif, pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi

atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi,

Struktur Birokasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi". merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi."

B. Perkembangan Remaja

Remaja merupakan kelompok potensial yang perlu mendapat perhatian serius karena remaja dianggap sebagai kelompok yang mempunyai risiko secara seksual maupun kesehatan reproduksi dimana mereka memiliki rasa keingintahuan yang besar dan ingin mencoba sesuatu yang baru (Syamsulhuda dkk, 2010). Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan

yang matang. Apabila keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik tersebut tidak tepat, mereka akan jatuh dalam perilaku berisiko dan mungkin harus menanggung akibat jangka pendek dan jangka panjang dalam berbagai masalah kesehatan fisik dan psikososial³¹

Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu memproduksi. Menurut Konopka dalam buku Yudik Jahja, masa remaja dibagi kepada tiga tahap:

3. Remaja awal: 12-15 tahun
4. Remaja madya: 15-18 tahun
5. Remaja akhir: 19-22 tahun

Sementara Salzman dalam buku Yudik Jahja, mengemukakan bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung (dependence) terhadap orangtua ke arah kemandirian (independence), nilai-nilai estetika dan isu-isu moral³². Masa remaja adalah masa datangnya pubertas (11-14) sampai usia sekitar 18 tahun, masa transisi dari kanak-kanak ke dewasa. Masa ini hampir selalu merupakan masa-masa sulit bagi remaja maupun orang tuanya. Ada jumlah alasan untuk ini

1. Remaja mulai menyampaikan kebebasan dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Tidak

³¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, 2012

³² Yudik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 240

terhindarkan, ini dapat menciptakan ketegangan dan perselisihan dan dapat menjauhkan ia dari keluarga

2. Remaja lebih mudah dipengaruhi teman-temannya dari pada orang tuanya, ini berarti pengaruh orangtua pun melemah.
3. Remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhan fisik maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai muncul dapat menakutkan, membingungkan dan menjadi sumber perasaan salah dan frustrasi
4. Remaja sering menjadi terlalu percaya diri dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan ia sukar menerima nasehat orang tua³³

Menurut Stanley Hall dalam buku Agoes Dariyo, mengemukakan bahwa masa remaja dianggap masa topan-badai dan stress (strom and stres), karena remaja memiliki keinginan bebas untuk menentukan pilihan hidupnya. Mereka bertindak tanpa berpikir panjang dan akan melakukan apa saja sesuai keinginannya³⁴ Terkait dengan keinginan remaja yang memiliki keinginan bebas untuk menentukan pilihan hidupnya, tentu saja hal ini perlu dibatasi. Batasnya adalah norma sosial dan norma agama yang berlaku dilingkugannya. Masyarakat perlu

³³ Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung:Remaja Rosdakarya Offset, 2005), h. 102.

³⁴ Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 13.

memberikan kontrol sosial bagi remaja, mengayomi serta mendidik mereka. Masyarakat harus memberikan teladan yang baik pada remaja agar mereka terhindar dari perilaku beresiko

Ketika remaja memasuki masa puber remaja akan mengalami perubahan fisik yang cepat salah satu dan perubahan fisik tersebut adalah kemampuan remaja untuk melakukan proses reproduksi, tetapi banyak fenomena memperlihatkan sebagian remaja belum mengetahui dan memahami tentang kesehatan reproduksi, misalnya tentang masa subur dan bagaimana terjadinya kehamilan³⁵

Remaja mengalami masa pertumbuhan, perubahan organ-organ reproduksi yang semakin matang dan perubahan fisik lainnya. Hal ini menyebabkan dorongan serta gairah seksual semakin kuat dalam diri mereka dan diiringi dengan rasa penasaran yang tinggi pula, mereka seringkali terjerumus dalam perilaku seks bebas (free seks). Ini merupakan salah satu perilaku beresiko yang menularkan HIV dan AIDS bahkan hamil di luar nikah. Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi ini, pengguna media seperti internet dan alat kontrasepsi dapat memberi pengaruh buruk bagi remaja jika disalahgunakan. Televisi, koran, majalah juga menyampaikan

³⁵ BKKBN, *Pelatihan Pemberian Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Jakarta: Direktorat Remaja dan perlindungan Hak-Hak Reproduksi BKKBN, 2008).

informasi secara bebas bagi masyarakat umum, termasuk remaja yang belum mampu mengolah informasi tersebut secara benar³⁶

C. Alat Kontrasepsi

1. Pengertian Alat Kontrasepsi dan Jenisnya

Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontrasepsi berarti “melawan” atau “mencegah”, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menunda atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Untuk itu, berdasarkan maksud dan tujuan kontrasepsi, maka yang membutuhkan kontrasepsi adalah pasangan yang aktif melakukan hubungan seks dan keduanya memiliki kesuburan normal namun tidak menghendaki kehamilan.³⁷

Alat kontrasepsi banyak jenisnya, yaitu:

1. Kondom berupa penutup karet mencegah sperma bertemu dengan sel telur wanita. Kondom amat mudah digunakan dan amat mudah pula diperoleh. Dalam masyarakat kita dapat memperoleh dari: pusat kesehatan masyarakat, kader kesehatan, apotik, toko obat, rumah sakit, dan sebagainya.
2. Pil suatu tablet kecil yang harus diminum oleh si ibu setiap hari. Pil ini akan membuat tubuhnya tidak menghasilkan

³⁶ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*(2015), h. 39.

³⁷ Suratun dkk, *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*, (Jakarta: Trans info media, 2008), h. 27.

sel telur. Pil belum tentu baik untuk wanita. Petugas kesehatan di Klinik akan melakukan beberapa tes untuk memutuskan wanita mana yang tidak boleh meminumnya. Pil pertama kali diperkenalkan di Australia pada 1961, dan disambut sebagai pemecahan masalah yang sangat besar. Di sinilah untuk pertama kalinya, metode kontrasepsi yang sangat efektif secara total berada dalam kendali pihak wanita. Metode ini mengubah banyak sikap kelompok sosial dan memungkinkan kebebasan seksual yang lebih besar dari pada waktu sebelumnya, khususnya untuk wanita dan pria muda

3. IUD (Intra Uterine Devices) merupakan alat yang dimasukkan kedalam rahim wanita. Alat ini akan menyulitkan telur untuk tinggal dalam kandung rahim dan berkembang menjadi bayi
4. Injeksi atau suntikan ibu diberi injeksi setiap 3 bulan sekali di pusat kesehatan masyarakat, yang akan berakibat berhentinya produksi telur
5. Diaphragma dan spons merupakan alat dimana seorang ibu dapat belajar memasukkan dan mengambilnya sendiri. Alat ini akan menghentikan sperma bertemu dengan sel telur wanita.³⁸

³⁸ Adi Heru, *Kader Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Buku kedokteran EGD, 1995), h. 23

2. Dampak Penggunaan Alat Kontrasepsi bagi Remaja

Masalah hubungan seks pada remaja makin lama makin bebas oleh karena beberapa faktor yaitu pengaruh globalisasi, media massa dan elektronik yang dilihat dan dibaca, penundaan perkawinan menjadi sekitar 20 tahun dan kebutuhan biologis remaja yang sulit dibendung. Luasnya hubungan internasional dalam pergaulan yang menyebabkan pengaruh kebudayaan terhadap kebiasaan hidup masyarakat, meningkatnya kehamilan yang tidak dikehendaki sehingga mencari pemecahan irasional dengan gugur kandungan yang akibatnya lebih gawat, serta makin meningkat penyakit hubungan seksual. Berdasarkan pertimbangan tersebut sudah waktunya untuk memikirkan pemecahan masalah yang mempunyai dampak psikologis dan klinis sehingga menguntungkan remaja³⁹.

Ketua Asia-Pacific council on contraception (APCOC) Biran dalam buku Eko A. Meinarno dkk, mengungkapkan ber-KB memberikan keuntungan antara lain: meningkatkan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas hidup keluarga, pemberdayaan perempuan, pelestarian lingkungan, stabilitas keamanan negara, pertumbuhan ekonomi makro dan pengurangan aborsi. Guna mewujudkan kondisi dari keuntungan ber-KB maka setiap pasangan suami istri menggunakan bermacam ragam jenis kontrasepsi salah satunya kondom. Kondom merupakan bentuk kontrasepsi yang

³⁹ Ida Ayu Chandranita Manuaba dkk, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), h. 246.

dirancang untuk suami istri, kondom jenis kontrasepsi sangat mudah didapatkan di apotik dan toko obat dengan harga yang terjangkau. Oleh karenanya maka banyak disalah gunakan oleh individu-individu yang belum pantas menggunakan alat tersebut misalnya saja remaja. Remaja yang terjerumus pergaulan bebas lebih dominan menggunakan alat kontrasepsi jenis kondom yang bertujuan untuk mencegah kehamilan dari seks bebas yang dilakukan dengan pasangannya, yang semestinya remaja tidak melakukannya seks bebas apalagi menyalahgunakan alat kontrasepsi.

Kematangan organ seks dapat berpengaruh buruk bila remaja tidak mampu mengendalikan rangsangan seksualnya, sehingga tergoda untuk melakukan hubungan seks pranikah. Hal ini akan menimbulkan akibat yang dapat dirasakan bukan saja oleh pasangan khususnya remaja putri, tetapi juga orang tua, keluarga bahkan masyarakat. Seks dapat membahayakan kesehatan terutama bagi wanita. Hal ini dikarenakan hubungan seks dini dan sering merupakan salah satu faktor yang dihubungkan dengan kanker pada leher Rahim. Sebabnya mengapa setiap dua tahun uji saring pap smear dianjurkan bagi semua wanita yang pernah melakukan senggama. Uji yang sederhana ini dapat melihat perubahan-perubahan awal sel-sel leher rahim, yang bisa berkembang menjadi bentuk prakanker yang lebih serius atau kanker jika dibiarkan tanpa perawatan⁴⁰

⁴⁰ Kendra Sundquist, Kontrasepsi, h. 2-8.

D. Teori Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Secara Etimologis, Istilah *Siyasah* berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁴¹

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam islam di nyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan Negara mayoritas islam dan mengatut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala Negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan Perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila di anggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-quran dan sunnah, umat islam di perintahkan untuk menaati ulil amri atau pemimpin suatu Negara dengan syarat apabila lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul-Nya serta

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6

menghindari dosa dan pelanggaran.⁴²

Fiqh Siyasah *Tanfidziyyah Syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *Siyasah Tanfinziyyah Sar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁴³

Berdasarkan kajian konsep Negara hukum tersebut dan hubungan timbal balik dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu didalam siyasah dusturiyah ada batasan perundangan-undangan yang di tuntutan oleh hak ihwal kenegaraan.⁴⁴

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.

⁴² Muhammad iqbal, *fiqh siyasah*, h.177

⁴³ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277

⁴⁴ A Djazali, *fiqh siyasah , implementasi kemaslahatan umat dalam rambu syariah*, Jakarta: kencana . 2004), h. 47

- 4) Persoalan *bai'at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁴⁵

Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut memiliki makna sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah kekuasaannya, baik dalam aspek pemerintahan, atau urusan dunia lainnya. Khusus untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas kenabian yang wajib mengurus urusan agama.⁴⁶

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, Dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *Maqosidu Syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena Dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *Ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁷

⁴⁵ Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 12

⁴⁶ Yusuf Qardawi, "Min Fiqhi al-Daulah Fi al-Islâm, terj. Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah*", (Cet. 3; Jakarta: Al-Kausar, 1998), h. 113.

⁴⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 34